

**STRATEGI SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2024
(STUDI PADA KPU PROVINSI LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD GHIFARI AULIA FARABI

NPM 2116021084



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**STRATEGI SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2024
(STUDI PADA KPU PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

MUHAMMAD GHIFARI AULIA FARABI

2116021084

(skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**STRATEGI SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2024
(STUDI PADA KPU PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

Muhammad Ghifari Aulia Farabi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur Lampung 2024. Pemilih pemula merupakan kelompok usia muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan cenderung memiliki tingkat literasi politik yang rendah, sehingga rentan terhadap pengaruh eksternal serta informasi yang tidak akurat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori strategi politik Peter Schroder yang membagi strategi menjadi ofensif (perluasan pasar dan penembusan pasar) serta defensif (mempertahankan pasar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan berbagai program sosialisasi seperti *KPU Goes to School*, *KPU Goes to Campus*, pemanfaatan media sosial, serta pelibatan pemuda dalam simulasi pemilu. Strategi perluasan pasar dilakukan dengan menjangkau segmen-segmen baru melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi kepemudaan, sedangkan strategi menembus pasar dilakukan dengan pemetaan kebutuhan pemilih pemula dan penyesuaian metode sosialisasi berbasis digital. Sementara itu, strategi mempertahankan pasar dilaksanakan melalui sosialisasi langsung ke lapangan, pemutakhiran data pemilih, dan pelibatan badan adhoc. Namun, efektivitas strategi-strategi tersebut masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses informasi di daerah terpencil, apatisme politik, serta pengaruh hoaks digital, sehingga partisipasi pemilih pemula masih cenderung menurun dari pemilu ke pilkada. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kolaborasi yang lebih intensif agar partisipasi pemilih pemula dapat meningkat secara signifikan dan mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih sehat di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Strategi Sosialisasi, Pemilih Pemula, Partisipasi Politik, KPU, Pilkada 2024

***SOCIALIZATION STRATEGY TO INCREASE FIRST-TIME VOTER
PARTICIPATION IN THE 2024 LAMPUNG GUBERNATORIAL ELECTION
(A Study on the General Election Commission of Lampung Province)***

By

Muhammad Ghifari Aulia Farabi

Abstract

This study aims to analyze the socialization strategies implemented by the General Elections Commission (KPU) of Lampung Province to increase first-time voter participation in the 2024 Lampung Gubernatorial Election. First-time voters, who are generally young and casting their votes for the first time, often have low political literacy and are vulnerable to external influences and inaccurate information. This research employs a qualitative descriptive method, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation studies. The study is based on Peter Schroder's political strategy theory, which divides strategies into offensive (market expansion and penetration) and defensive (market retention). The findings reveal that the KPU of Lampung Province has implemented various socialization programs, including "KPU Goes to School," "KPU Goes to Campus," the use of social media, and youth involvement in election simulations. Market expansion strategies are carried out by reaching new segments through collaboration with educational institutions and youth organizations, while market penetration strategies involve mapping the needs of first-time voters and adapting digital-based socialization methods. Meanwhile, market retention strategies are implemented through direct field socialization, voter data updating, and the involvement of adhoc bodies. However, the effectiveness of these strategies still faces challenges, such as limited access to information in remote areas, political apathy, and the influence of digital hoaxes, resulting in a declining trend of first-time voter participation from general elections to regional elections. Therefore, more intensive innovation and collaboration are needed to significantly increase first-time voter participation and support the realization of a healthier democracy in Lampung Province.

Keywords: *Socialization Strategy, First-Time Voters, Political Participation, KPU, 2024 Regional*

Judul Skripsi : **STRATEGI SOSIALISASI DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG
2024 (STUDI PADA KPU PROVINSI
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **M. Ghifari aulia farabi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021084**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

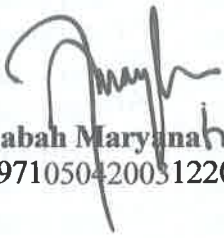
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Budi Harjo., S.Sos., M. IP
NIP. 196801121998021001

MENGETAHUI

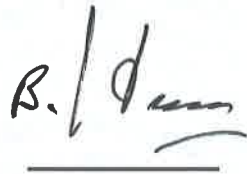
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Tabah Maryamah
NIP 197105042005122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo., S.Sos, M. IP.**



Penguji Utama : **Himawan Indrajat., S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Prof. Dr Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 00032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Juli 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp features the number '10000' in large digits, the word 'METR' (part of 'METER'), and a serial number 'H3C6AMX450324898' at the bottom. The signature is fluid and cursive.

Muhammad Ghifari Aulia Farabi

NPM 2116021084

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Ghifari Aulia Farabi dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Juni 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Putra dari Bapak Herie Bastian dan Ibu Rini Susanti. Memiliki satu orang kakak bernama Adisty Azalia Alyajna dan seorang adik bernama Rahma Kamila Assyfa.

Jenjang pendidikan yang pernah penulis tempuh dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Sandi Putra tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut 2015 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Bandar Lampung tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung tahun 2021. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non akademik dalam usaha menunjang kapasitas diri. Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi maupun magang diantaranya HMJ Ilmu Pemerintahan sebagai anggota Biro 3 Minat Bakat dan Kerohanian, kemudian dipercaya menjadi Sekertaris Biro 3 HMJ Ilmu Pemerintahan Minat Bakat dan Kerohanian.

Penulis sempat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 38 hari secara berkelompok. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan KKN di Desa Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan dan berkesempatan melakukan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Komisi Pemeliharaan Umum (KPU) Provinsi Lampung

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih lah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia ”

(Baskara Putra)

“ mereka hanya tau namamu, mereka takkan jadi dirimu”

(Baskara Putra)

“Hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar”

(Baskara Putra)

“Diantara pusaran nirfungsi, petakan semua lagi titik tuju yang telah terpatrit melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh, bersandar hihahkan bebanmu”

(33x - Perunggu)

PERSEMBAHAN



Alhamduillahirabbil'alamiin, telah engkau ridhoi Ya Allah langkah hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Teriring Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

dan

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua Orang Tua Ku Papah Tersayang

Drs. Herie Bastian

Mamah Tersayang

Rini Susanti

Kakak dan Adik ku tercinta

Adisty Azalia Alyajna dan Rahma Kamila assyfa

Serta Nenek Tercinta

Hj. Hafsah

Terimakasih untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan kepadaku, terima kasih untuk tetap mempercayai mimpiku disaat semua orang mencoba menghancurkannya, dalam setiap helaan nafas dan tulusnya perjuangan, semoga menjadi amal baik yang tidak terhapuskan.

Kepada teman-teman seperjuangan dan Kepada Almamater yang Penulis cintai dan banggakan Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “STRATEGI SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2024 STUDI PADA KPU PROVINSI LAMPUNG”. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “STRATEGI SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2024 STUDI PADA KPU PROVINSI LAMPUNG”. sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Ibu Tabah Maryanah, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
7. Bapak Budi Harjo, S. Sos., M. IP., selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikan nya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luang dan memberikan saran serta masukannya demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik. Terima kasih sebanyak banyaknya penulis ucapkan atas bimbingannya baik dalam hal akademik maupun non akademik, terimakasih atas banyaknya pengalaman yang telah bapak berikan. Semoga bapak sehat selalu dan setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT
8. Bapak Himawan Indrajat, S.I.P., M.S.i., selaku Dosen Penguji penulis yang telah memberikan banyak kritik, saran dan masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai di posisi saat ini. Terima kasih atas segala yang engkau berikan, semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT
10. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Mba Shela dan Bu Merta. Terima Kasih sudah mau direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;

11. Seluruh Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman selama penulis melaksanakan kegiatan magang dan melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan. Pada kesempatan ini saya haturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Moh. Ade Candra selaku Kasubbag Partisipasi Masyarakat, abang Vico Bagja Lukito dan Dwi Priapkara selaku Staff Divisi Partisipasi Masyarakat, telah memberikan pelajaran baru dan warna di hari-hari penulis menjalani PKL. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
12. Terima kasih kepada seluruh Informan yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi, semoga Bapak/Ibu sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT;
13. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Bunda tercinta atas segala dukungan, kasih sayang, serta kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Tanpa doa, bimbingan, dan pengorbanan Ayah dan Bunda, saya tidak akan mampu melewati berbagai tantangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir dan meraih gelar sarjana. Segala motivasi, perhatian, dan nasihat yang diberikan menjadi kekuatan bagi saya untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Bunda.
14. Terimakasih kepada kakak dan adik adisty dan assyfa yang selalu menyemangati penulis, yang selalu mengerti keadaan kakak, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT
15. Terimakasih Kepada Nenek yang telah memberikan semangat baik kata-kata maupun materi, terimakasih tidak pernah lelah menyemangati ketika kanjeng sedang merasa sedih, terimakasih sudah selalu memeluk dan menjadi salah satu tempat pulang ternyaman, saya harap nenek selalu

menemani sehingga selalu bisa menemani setiap langkah yang saya lakukan;

16. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat yang telah diberikan, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
17. Kepada para sahabatku, Vania, Ira, Sisy, Jahdir, Biya, Nita, Bela, Desta, Mojel, Piwa, Bisma, Dika, Fairuz, Gipari, Fajri, Rafli, Aryo, dan Wahyu, Intan, Tarina. yang telah menjadi sahabat sejati selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas rasa sayang, dukungan, dan kesediaan kalian untuk selalu berbagi keluh kesah serta suka duka bersama. Kehadiran kalian telah mewarnai hari-hariku dan memberikan semangat dalam menjalani proses perkuliahan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalani kehidupan, dan dapat meraih seluruh cita-cita yang kita impikan serta jalan jalan bersama keseluruhan penjuru negeri. Terima kasih telah beriringan bersama dalam perjalanan ini, semoga persahabatan kita terus terjaga dan membawa kebaikan bagi masa depan kita semua.;
18. Kepada WSP Company, Lerici, Farhan, Rakha, Aji, Derry, Fairus, Rizky, Chio, Wildan, Farel, Dimas, Gery, Hadad, Isroq, Rehan, Rangga, Athar, Marcus, Fahmi dan yang lain belum bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih sudah menemani penulis sejak awal bangku sekolah menengah atas sampai sekarang semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah serta karir yang bersinar agar reuni kita dimasa mendatang masing masing sudah bisa membawa istri yang cantik serta mobil sport masing masing.
19. Kepada teman teman MBKM penelitian KPU Provinsi Lampung David, Ropelia, Fairus Terima kasih telah menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup Penulis dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga hubungan kita akan selalu terjalin;

20. Kepada teman KKN Desa Gedung Pakuon Myrna, Ragin, Adhim dan Alep, Jihan terimakasih atas perjalanan hidup selama 38 hari di rumah yang sama, terimakasih telah atas dukungannya selama ini;
21. Kepada teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya teman-teman angkatan 2021, terima kasih telah memberi warna dalam proses perkuliahan penulis, semoga hubungan pertemanan kita tetap terjalin,
22. Dan yang terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri “Muhammad Ghifari Aulia Farabi”. Terima kasih sudah menyelesaikan tanggung jawab ini, terima kasih sudah melawan segala perasaan selama proses mengerjakan tugas akhir. Terimakasih untuk tetap tegak berdiri menyelesaikan kewajibanmu di tengah banyaknya cobaan yang datang. Terima kasih ya sudah berjuang untuk sampai di titik ini, semoga tetap rendah hati karena perjuanganmu mewujudkan cita cita.

Bandar Lampung, 10 Juli 2025
Penulis

Muhammad Ghifari Aulia Farabi
2116021084

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABLE	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Strategi	11
2.1.1 Pengertian Startegi	11
2.1.2 Perencanaan Strategi	12
2.1.3 Bentuk Strategi	14
2.2 Tinjauan Sosialisasi	16
2.2.1 Pengertian Sosialisasi	16
2.2.2 Bentuk Sosialisasi	17
2.2.3 Sosialisasi Politik	18
2.2.4 Hubungan Sosialisasi Politik Dengan Partisipasi Politik	20
2.2.5 Metode Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula	21
2.3 Pemilih Pemula	24
2.4 Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Sumber Data	29
3.5 Teknik Penentuan Informan	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Pengolahan Data	33
3.8 Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	36
4.1 Gambaran Umum KPU Provinsi Lampung	36

4.1.1	Provinsi Lampung	36
4.1.2	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	37
4.1.3	Visi Misi Kpu Provinsi Lampung	39
4.1.4	Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Lampung	40
4.1.4	Struktur Sekretariat KPU Provinsi Lampung	44
4.2	Sejarah Pemilihan Gubernur Lampung	45
4.3	Sosialisasi KPU Provinsi Lampung	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		48
5.1.1	Strategi Memperluas Pasar	49
5.1.2	Strategi Menembus Pasar	73
5.1.3	Strategi Mempertahankan Pasar	89
5.1.4	Mempertahankan Basis Masa Tetap	89
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		96
6.1	Kesimpulan	96
6.2	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....		100

DAFTAR TABLE

Table 1.1 Data Partisipasi Pemilih di Pilgub Lampung 2018	4
Tabel 1.2 Jumlah Pemilih Baru Pada DPT Pilgub Lampung 2024	6
Tabel 3. 1 Table Informan	31
Tabel 5. 1 Dokumentasi Kegiatan KPU	56
Tabel 5. 2 Dokumen Pendukung KPU provinsi Lampung	59
Tabel 5. 3 Rekap Dokumentasi KPU	62
Tabel 5. 4 Rekap Dokumentasi KPU	64
Tabel 5. 5 Retang Umur Pemilih.....	68
Tabel 5. 6 Rekap Dokumentasi KPU	72
Tabel 5. 7 Dokumentasi KPU Provinsi Lampung.....	73
Tabel 5. 8 Dokumentasi Film tepatilah janji	74
Tabel 5. 9 Dokumentasi KPU.....	76
Tabel 5. 10 Gambar Dokumentasi KPU.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 DPT Pilgub Lampung 2024.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1 Bagan Sekretariat KPU Provinsi Lampung.....	44

DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
WNI	: Warga Negara Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
DPT	: Daftar Pemilihan Tetap
Pilgub	: Pemilihan Gubernur
CSIS	: <i>Center of Strategic International Studies</i>
SWOT	: <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Golput	: Golongan Putih
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Polri	: Polisi Republik Indonesia
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
KPPSLN	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPM	: Dewan Perwakilan Mahasiswa
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
FGD	: Focus Group Discussion
E-Coklit	: Electronic Pencocokan dan Penelitian
Ad hoc	: Bersifat sementara, untuk badan pelaksana non-permanen
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah inti dari sistem demokrasi, berfungsi sebagai cara utama bagi semua warga negara untuk ikut serta dalam proses politik. Melalui hak suaranya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan arah kebijakan negara. Oleh karena itu, pemilihan umum bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan wujud nyata dari kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan masyarakat. Di Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum secara berkala telah menjadi tradisi konstitusional yang menjamin berlangsungnya pergantian kepemimpinan secara damai dan demokratis. Hal ini memungkinkan rakyat untuk secara berkala mengevaluasi kinerja pemerintahan dan memilih pemimpin yang lebih baik sesuai dengan harapan dan aspirasi mereka.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.(Munthe dkk., 2024).

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu dan pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut pilkada adalah dua cara rakyat Indonesia menggunakan kedaulatan mereka dalam sistem demokratis. Pemilu digunakan secara nasional untuk memilih kepala negara tertinggi, sedangkan pilkada

dilaksanakan di provinsi, kabupaten, atau kota. Keduanya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Undang-Undang ini merupakan pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam demokrasi, nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan rakyat menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan negara. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dan menentukan nasib bangsanya. Baik pemerintah maupun rakyat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi (Rahma Bachtiar, 2014). Partisipasi merupakan elemen penting dalam mendorong perubahan yang signifikan. Ketika setiap individu menyumbangkan kemampuan dan pandangan uniknya, akan terbentuk kekuatan kolektif yang luar biasa. Partisipasi tidak hanya berarti mengikuti arus, tetapi juga mencakup keberanian untuk menyampaikan pendapat, memberikan ide-ide inovatif, dan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan berpartisipasi, kita tidak sekadar menjadi penonton, melainkan juga berperan sebagai aktor utama dalam membangun masa depan yang lebih baik.(Wahyudi dkk, 2019).

Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses politik untuk mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kepentingan umum dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan yang dapat memengaruhi kebijakan publik dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. (Halim, R dkk.,2016).

Pemilih pemula adalah kelompok yang menarik untuk diteliti karena mereka baru pertama kali menggunakan hak suara dalam pemilu. Mereka memiliki

karakteristik yang membedakan dari pemilih berpengalaman, seperti kurangnya pengetahuan tentang proses politik dan isu-isu terkini, yang membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh eksternal. Selain itu, sebagai generasi digital, pemilih pemula terbiasa dengan teknologi dan media sosial, tetapi sering kali tidak memiliki keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi informasi yang diterima. Penelitian mengenai pemilih pemula dapat memberikan wawasan penting tentang perilaku politik mereka dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan memilih. Memahami dinamika kelompok ini juga dapat membantu dalam merancang strategi sosialisasi yang efektif dari partai politik dan lembaga pemilu, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

Pemilih pemula adalah individu yang akan memberikan suara untuk pertama kalinya dalam pemilu. Mereka terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mencapai usia 17 tahun atau yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 348, yang menyatakan bahwa mereka yang memenuhi syarat tersebut berhak untuk ikut serta dalam pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Berikut pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

1. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.
2. Pemilik kartu tanda elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan.
3. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
4. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

KABUPATEN/KOTA	PENGUNA HAK PILIH (DPT+DPPH+DPTb)			TINGKAT PARMAS (%)
	L	P	JUMLAH	TOTAL
1 BANDAR LAMPUNG	219,327	236,648	455,975	69.41%
2 METRO	37,394	39,739	77,133	68.80%
3 LAMPUNG BARAT	78,273	70,303	148,576	72.30%
4 LAMPUNG SELATAN	243,571	250,472	494,043	69.72%
5 LAMPUNG TENGAH	332,165	332,718	664,883	72.84%
6 LAMPUNG TIMUR	261,679	261,995	523,674	68.46%
7 LAMPUNG UTARA	164,584	164,708	329,292	75.45%
8 MESUJI	51,323	49,215	100,538	69.54%
9 PESAWARAN	118,208	117,603	235,811	72.86%
10 PESISIR BARAT	37,809	35,293	73,102	68.97%
11 PRINGSEWU	106,176	106,939	213,115	73.23%
12 TANGGAMUS	159,982	155,406	315,388	69.66%
13 TULANG BAWANG	88,277	81,569	169,846	66.31%
14 TULANG BAWANG BARAT	75,387	74,031	149,418	78.23%
15 WAY KANAN	115,940	112,671	228,611	70.41%
JUMLAH	2,090,095	2,089,310	4,179,405	70.99%
Pemilih Terdaftar (DPT)			5,887,152	

Table 1.1 Data Partisipasi Pemilih di Pilgub Lampung 2018

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada Lampung 2018 tercatat sebesar 70,99%, dengan sekitar 4.179.405 pemilih yang menggunakan hak suaranya dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 5,887 juta. Namun, masih terdapat sekitar 1.707.747 pemilih terdaftar yang belum menggunakan hak pilihnya di pilkada tersebut, yang menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi di pemilihan berikutnya.

Penting untuk dicatat bahwa partisipasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pilkada Lampung 2014 yang mencapai sekitar 76%. Faktor-faktor penyebab menurunnya partisipasi tersebut antara lain kekecewaan

masyarakat terhadap janji kampanye calon, ketidaksadaran pentingnya menggunakan hak pilih, serta faktor visi dan misi calon yang kurang menarik di mata pemilih. Selain itu, KPU telah mengupayakan peningkatan partisipasi dengan memberikan pendidikan politik, sosialisasi yang masif, serta menyiapkan sarana dan prasarana pemilu yang baik.

Dengan latar tersebut, KPU menghadapi misi strategis untuk meningkatkan angka partisipasi dengan berbagai pendekatan yang efektif, seperti edukasi politik yang lebih intensif, penggunaan media sosial dan media massa untuk menyebarluaskan informasi pemilu, kolaborasi dengan berbagai komunitas, serta pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi angka golongan putih (golput) dan mendorong pemilih agar lebih sadar akan pentingnya hak pilih demi kualitas demokrasi yang lebih baik ke depan.



Gambar 1.1 DPT Pilgub Lampung 2024

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Tingginya jumlah partisipasi pemilih muda dan pemilih pemula pada rentang Generasi Z (17-26) mencapai 1.405.586 pada DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu. Sifat pemilih baru atau disebut juga pemilih pemula yang berubah ubah atau dengan kata lain labil menjadi tantangan yang harus di hadapi bagi penyelenggara pemilu untuk menekan angka golput di kelompok

pemilih pemula. KPU Provinsi Lampung harus melakukan pendekatan yang menarik, mudah dipahami dan sesuai perilaku generasi muda. Dengan adanya sosialisasi dan pendidikan politik yang tepat, pemilih pemula dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam demokrasi dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Partisipasi politik pemilih pemula memainkan peran penting dalam proses demokrasi, terutama dalam pilkada. Pemilih pemula, yang biasanya berusia antara 17 hingga 21 tahun, sangat antusias untuk menggunakan hak suara mereka, terutama karena ini adalah pengalaman pertama mereka dalam memilih. Namun, partisipasi mereka seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, kesadaran politik, dan pengaruh media massa. Selain itu, kesibukan sehari-hari sebagai pelajar atau pekerja dapat menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan politik.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	20	126	1.433	11.137
2	KOTA METRO	5	22	235	501
3	LAMPUNG BARAT	15	136	518	410
4	LAMPUNG SELATAN	17	260	1.592	2.227
5	LAMPUNG TENGAH	28	311	1.998	2.094
6	LAMPUNG TIMUR	24	264	1.621	1.384
7	LAMPUNG UTARA	23	247	1.065	1.158
8	MESUJI	7	105	346	520
9	PESAWARAN	11	148	760	1.211
10	PESISIR BARAT	11	118	293	540
11	PRINGSEWU	9	131	628	715
12	TANGGAMUS	20	302	981	1.240
13	TULANG BAWANG	15	151	670	2.656
14	TULANG BAWANG BARAT	9	103	431	646
15	WAY KANAN	15	227	711	932
	TOTAL	229	2.651	13.282	27.371

Table 1.2 Jumlah Pemilih Baru Pada DPT Pilgub Lampung 2024

Jumlah pemilih baru menjadi fokus penting bagi KPU untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi yang tepat kepada calon pemilih yang akan

menggunakan hak pilihnya. Hal ini sejalan dengan misi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Serentak. Karena pemilih pemula belum pernah menggunakan hak pilih sebelumnya dan memiliki pengalaman yang minim, hal ini rentan memicu sikap apatisisme politik di kalangan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif dan terarah sangat diperlukan guna membangun kesadaran dan antusiasme pemilih muda agar mereka aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Peran KPU tidak terbatas pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, namun juga mencakup upaya strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi politik merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi representatif. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pemilihan mencerminkan tingkat kesehatan demokrasi di suatu daerah, karena menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan komitmen mereka terhadap pembangunan daerah. Rendahnya partisipasi dapat mengindikasikan adanya kendala dalam sistem demokrasi, seperti kurangnya akses informasi, rendahnya pendidikan politik, atau apatisisme politik.

Hasil survei *Center Of Strategic International Studies* mengungkapkan bahwa pemilih pemula, yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu, cenderung memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah dan kurang mengikuti perkembangan politik. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya memberikan suara berdasarkan pengaruh orang yang lebih tua, mengikuti pilihan orang-orang di sekitarnya, atau bahkan memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali (golput). Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi secara lebih sadar dan mandiri.

Myron Weiner mengidentifikasi lima faktor yang mendorong munculnya partisipasi politik. (Mangngasing dkk., 2023)

- a. Modernisasi: proses modernisasi meningkatkan kesadaran pemilih sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Partisipasi politik ini bisa bersifat konvensional maupun non-konvensional

- b. Perubahan struktur kelas sosial: modernisasi yang cepat menciptakan kesetaraan dalam struktur kelas sosial di kalangan pemilih. Aspek seperti pendidikan dan kondisi ekonomi berpengaruh pada partisipasi mereka, yang memiliki hak setara untuk ikut serta dalam pemilihan umum dengan keyakinan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat
- c. Pengaruh kaum intelektual dan media massa modern: kaum intelektual dan media massa berperan penting dalam membentuk ide-ide baru tentang nasionalisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui berbagai saluran media
- d. Konflik antara pemimpin politik: Persaingan antara pemimpin politik untuk mendapatkan kekuasaan sering kali melibatkan pencarian dukungan dari masyarakat, termasuk pemilih pemula. Hal ini dapat memicu praktik politik uang. Keterlibatan pemerintah yang semakin besar dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya menuntut partai politik untuk berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mendidik masyarakat mengenai politik. Partai politik juga berupaya mendekati pemilih pemula dengan berbagai strategi dalam kegiatan pemerintah untuk membangun citra positif dan meraih dukungan mereka.

Sosialisasi pendidikan pemilih untuk pemilih pemula perlu mengadopsi pendekatan komunikasi yang sesuai dengan preferensi dan kebiasaan mereka mengingat pemilih pemula dikategorikan sebagai generasi muda yang terbiasa akan penggunaan digital, terutama dalam konteks penggunaan media sosial, video pendek, dan forum diskusi online. Pendekatan ini penting karena generasi muda, termasuk pemilih pemula, sangat terhubung dengan teknologi dan lebih cenderung menyerap informasi melalui platform digital.(Hasfhi Muturizal, 2024).

Dalam pelaksanaan sosialisasinya, KPU Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Sasaran sosialisasinya pun berbagai kalangan masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus sosialisasi adalah para

pemilih pemula. Sebab pemilih pemula ini masih perlu untuk diedukasi, diajak dan diarahkan agar turut aktif dalam menyalurkan hak pilihnya. Adapun penelitian terdahulu dalam menunjang penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan (Haryono, 2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan lapangan. Data primer diperoleh melalui teknik *purposive sampling* (*key informan*) dan *snowball sampling*, serta data sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara kondensasi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih mencakup penguatan kelembagaan, sosialisasi politik, dan pendidikan bagi pemilih pemula

Kedua, penelitian yang dilakukan (Zakiruddin dkk, 2023) penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan partisipasi pemilih pemula memiliki peran krusial dalam pemilihan umum, terutama karena mereka merupakan generasi yang aktif menggunakan media sosial. Proses menuju pemilihan umum sering kali dipengaruhi oleh berbagai intrik dan isu yang diframing oleh media, yang kemudian disebarluaskan secara masif melalui platform media sosial. Namun, pemilih pemula yang aktif di media sosial dapat terpengaruh oleh berita-berita yang beredar, yang dapat mengakibatkan mereka ragu untuk berpartisipasi dalam pemilu. Penelitian ini bersifat lapangan, dengan pengumpulan data dilakukan secara langsung dari narasumber di KPU Kota Bengkulu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan (Fitri dkk, 2024) penelitian ini membahas tentang peran dan tantangan KPU dalam menghadapi Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada Generasi Z sebagai pemilih dominan yang sangat terhubung dengan teknologi digital dan media sosial. Meskipun ini mempermudah akses informasi, mereka juga rentan terhadap hoaks yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Tantangan utama KPU adalah mengatasi penyebaran *hoaks* di media sosial dan merancang strategi

komunikasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strategi Komunikasi yang terdiri dari strategi pesan dan strategi media. Strategi pesan yang digunakan oleh KPU Kota Semarang adalah dengan menggunakan panggilan dan hastag #temanpemilih untuk menyapa pengikutnya. Selain itu dibuat konten khusus yang sedang trend serta membuat konten berupa QnA “Tebak Tebak Seputar Pemilu” yang lebih diminati oleh follower anak muda.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Pulungan dkk., 2019) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. Teori yang digunakan adalah teori strategi politik dari Schroder (2010), yang menekankan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam penelitian ini, KPU Kota Bekasi menerapkan strategi ofensif dengan varian strategi perluasan pasar dan menembus pasar. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan sumber data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder dari kajian literatur serta dokumen terkait. Peneliti sendiri berfungsi sebagai instrumen penelitian, dengan informan yang terdiri dari penyelenggara pemilu dan masyarakat Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Bekasi melaksanakan sosialisasi secara masif dan merata, menyasar berbagai elemen masyarakat. Strategi ofensif KPU terbagi menjadi dua: memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan melalui program relawan demokrasi yang menargetkan 11 basis pemilih untuk optimalisasi sosialisasi. Di tingkat penyelenggara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Penggunaan teknologi, seperti media sosial, juga berperan penting dalam sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Harianja dkk., 2024) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Teori yang digunakan adalah Manajemen Strategi menurut Wheelen, Hunger, Hoffman, dan Bamford. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian terdahulu merupakan pondasi penting bagi peneliti untuk melakukan perbandingan dan menemukan inspirasi segar dalam pengembangan studi berikutnya. Selain itu, tinjauan penelitian sebelumnya memungkinkan peneliti untuk memposisikan karyanya dengan tepat dan menegaskan keunikan kontribusinya. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu diatas memiliki kesamaan dengan topik yang akan diteliti, antara lain terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta kesamaan judul yang memiliki fokus pada partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan, akan tetapi memiliki perbedaan yang paling utama yaitu locus penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitian adalah “Strategi Sosialisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak 2024 Studi Pada KPU Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Sosialisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Dilakukan Oleh KPU Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

1. Bagaimana Strategi Sosialisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Dilakukan Oleh KPU Provinsi Lampung?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam memahami strategi KPU Provinsi Lampung dalam melaksanakan sosialisasi ke pemilih pemula pada pilkada serentak 2024.
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini menjadi referensi, informasi ataupun masukan kepada KPU Provinsi Lampung khususnya pada bidang partisipasi masyarakat terkait bagaimana menarik perhatian pemilih pemula melalui strategi sosialisasi pendidikan pemilih di era saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari istilah Yunani "*strategos*," yang terbentuk dari kata "*statos*" yang berarti militer dan "*agein*" yang berarti memimpin. Ini menunjukkan bahwa istilah strategi memiliki akar yang kuat dalam konteks militer. Secara umum, strategi dapat dipahami sebagai teknik untuk meraih kemenangan dan mencapai tujuan. Seorang ahli strategi dan peperangan, Carl Von Clausewitz menyatakan strategi adalah penggunaan pertempuran untuk mencapai tujuan perang, diungkapkan dalam istilah "*The Use Of Engagements For The Object Of War*." strategi didefinisikan sebagai metode atau rencana yang dipilih untuk mencapai masa depan yang diinginkan, baik dalam pencapaian tujuan maupun solusi untuk masalah. Pengertian ini mencakup seni dan ilmu perencanaan serta pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif (Napir, 2016).

Menurut Glueck dan Jauch strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Purwanti, 2019). Menurut Johnson dan Scholes, strategi didefinisikan sebagai arah dan ruang lingkup suatu organisasi dalam jangka panjang, yang bertujuan untuk mencapai keuntungan melalui pengaturan sumber daya dalam lingkungan yang penuh tantangan. Strategi ini penting untuk memenuhi kebutuhan pasar serta harapan para pemangku kepentingan. Pemikiran mengenai strategi menjadi sangat diperlukan ketika ada sekelompok besar orang yang perlu dipimpin.

Hingga awal industrialisasi, istilah strategi hampir sepenuhnya terkait dengan konteks militer. Namun, seiring waktu, kepemimpinan atas kelompok besar juga menjadi relevan dalam bidang ekonomi. Dari situ, muncul konsep strategi perluasan yang digunakan untuk memimpin perusahaan. Seiring berjalannya waktu, strategi terus berkembang ke berbagai aspek masyarakat, termasuk politik, yang dipicu oleh pergerakan massa besar atau keanggotaan partai politik serta organisasi-organisasi dengan tujuan (Nafir, 2016).

Hamel dan Prahalad menjelaskan bahwa strategi adalah tindakan yang bersifat (berkembang secara bertahap) dan berkelanjutan, yang didasarkan pada pandangan mengenai apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan strategi biasanya dimulai dari "apa yang mungkin terjadi" alih-alih dari "apa yang sudah terjadi." Percepatan inovasi pasar dan perubahan pola konsumsi menuntut perusahaan untuk menemukan kompetensi inti dalam bisnis yang mereka jalankan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi utama mereka untuk tetap bersaing di pasar yang terus berubah (Atmaja dkk, 2019).

2.1.2 Perencanaan Strategi

Menurut Chandler strategi dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang mencakup penetapan tujuan dan sasaran jangka panjang bagi perusahaan. Dalam konteks ini, strategi tidak hanya berfokus pada apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang lebih panjang, tetapi juga melibatkan pengambilan tindakan yang tepat serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, strategi mencakup keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan yang dirancang untuk mengarahkan menuju visi dan misi jangka panjangnya (Purwanti, 2019).

a. Sasaran jangka panjang

Sasaran jangka panjang merujuk pada tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam rentang waktu tertentu. Perencanaan strategis harus dimulai dengan menetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran ini tidak hanya mencakup hasil akhir yang diinginkan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal dan internal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks ini, organisasi perlu melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Dengan memahami konteks ini, organisasi dapat menetapkan sasaran yang realistis dan dapat dicapai, serta menyusun rencana yang sesuai untuk mencapainya.

b. Pemilihan tindakan

Pemilihan tindakan melibatkan pengembangan program-program spesifik dan kegiatan operasional yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran. Organisasi harus mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan dan memilih yang paling efektif berdasarkan analisis situasi serta sumber daya yang ada. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami rencana tindakan ini agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal.

c. Alokasi sumber daya

Alokasi sumber daya adalah proses mendistribusikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek seperti keuangan, manusia, teknologi, dan informasi. Tanpa alokasi sumber daya yang tepat, bahkan strategi terbaik pun tidak akan berhasil. Organisasi perlu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mendukung pelaksanaan tindakan yang telah dipilih. Ini termasuk pengaturan anggaran, pengembangan keterampilan karyawan melalui pelatihan, serta

investasi dalam teknologi yang relevan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap penggunaan sumber daya juga diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai sasaran jangka panjang.

2.1.3 Bentuk Strategi

Dalam konteks pemilu, strategi politik digunakan sebagai cara untuk memenangkan kontestasi dengan merealisasikan rencana-rencana dan tindakan yang efektif untuk memperoleh dukungan pemilih. Strategi ini melibatkan analisis kekuatan dan potensi suara, serta penggunaan metode pendekatan yang paling efektif dan efisien untuk memikat pemilih dan memotivasi mereka untuk memberikan suara.

Strategi politik dalam konteks pemilu memiliki tujuan utama yaitu "kemenangan," baik bagi kandidat yang berupaya memenangkan kontestasi pemilu maupun bagi penyelenggara yang ingin meningkatkan partisipasi pemilih. Strategi ini menjadi instrumen penting dalam kemenangan di berbagai tingkatan pemilihan, mulai dari pemilihan legislatif dan presiden di tingkat nasional hingga pilkada dan pemilihan kepala desa di tingkat lokal. Penerapan strategi politik melibatkan berbagai aktivitas, termasuk analisis potensi perolehan suara dan metode pendekatan yang efektif terhadap para pemilih, untuk memastikan kandidat dapat menarik dukungan dan meraih suara dari pemilih (Pulungan dkk., 2019).

Peter Schroder membagi strategi politik ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Strategi ofensif

Strategi ofensif adalah pendekatan yang biasa digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah pemilih dengan menarik dukungan dari pemilih baru atau pemilih yang sebelumnya memilih partai lain. Strategi ini berfokus pada menciptakan perbedaan yang jelas dan menarik dibandingkan dengan pesaing, sehingga dapat mempengaruhi pandangan positif masyarakat terhadap partai tersebut (Pulungan dkk., 2019).

Strategi ofensif ini terbagi kedalam dua macam yakni sebagai berikut:

1. Strategi Perluasan Pasar Strategi, strategi ini berfokus pada pengenalan dan penawaran baru kepada calon pemilih yang belum pernah berpartisipasi pada pemilu sebelumnya. Keberhasilan strategi ini bergantung pada penggunaanya yang dapat memberikan penawaran yang menarik ataupun baru sehingga pemilih baru tertarik berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang
2. Strategi menembus pasar adalah pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi dari kelompok pemilih yang sudah ada. Taktik ini bisa meliputi peningkatan kualitas sosialisasi atau pengoptimalan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan cara ini, partai politik atau pihak penyelenggara pemilihan akan berusaha untuk memperkuat hubungan dengan pemilih yang sudah ada, memastikan mereka tetap terlibat dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang.

b. Strategi defensif

Strategi defensif terdiri dari dua jenis, yaitu mempertahankan pasar dan menutup pasar. Strategi mempertahankan pasar dan menutup pasar adalah pendekatan yang digunakan untuk menjaga dukungan mayoritas pemilih yang telah ada. Dalam konteks pemilihan, strategi ini mencakup upaya untuk merawat hubungan dengan pemilih tetap serta memperkuat pemahaman dan keterlibatan pemilih musiman. Dengan demikian, strategi ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dukungan dan mencegah kehilangan atau penurunan suara dalam setiap kontestasi politik.

2.2 Tinjauan Sosialisasi

2.2.1 Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga definisi utama. Pertama, sosialisasi diartikan sebagai usaha untuk mengalihkan kepemilikan individu menjadi milik bersama atau milik negara. Kedua, sosialisasi merupakan proses di mana seorang anggota masyarakat belajar dan memahami kebudayaan di sekitarnya. Ketiga, sosialisasi adalah upaya untuk memperkenalkan sesuatu agar menjadi dikenal oleh masyarakat luas. Menurut Zanden, sosialisasi adalah proses interaksi sosial yang memungkinkan individu untuk memahami cara berpikir, merasakan, dan berperilaku, sehingga dapat berperan aktif dalam lingkungan sosialnya (Herdiana, 2018).

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses sosial di mana individu memperoleh pembentukan sikap yang memungkinkan mereka untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Dalam konteks ini, sosialisasi berfungsi sebagai jembatan bagi individu untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan pengamatan, tetapi juga interaksi aktif dengan lingkungan sosial, yang membantu individu menginternalisasi perilaku yang dianggap baik dan diterima oleh kelompok sosial mereka. Dengan demikian, sosialisasi menjadi sangat penting dalam membentuk identitas dan karakter seseorang, serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam kehidupan sosial.

Giddens mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses yang berlangsung ketika seorang bayi yang rentan tumbuh dan berkembang secara aktif melalui berbagai tahap, hingga akhirnya menjadi individu yang menyadari keberadaannya sendiri, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai cara hidup dalam budaya yang mengelilinginya (Lahamit, 2021).

David B. Brinkerhoff dan Lynn K. White memberikan definisi sosialisasi sebagai suatu proses di mana individu belajar mengenai peran, status, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai institusi sosial. Sementara itu, David Gaslin menambahkan bahwa sosialisasi adalah proses pembelajaran yang dialami oleh seseorang untuk memahami nilai-nilai dan norma-norma agar dapat berfungsi dengan baik sebagai anggota kelompok masyarakat. Proses sosialisasi ini dapat terjadi baik secara langsung maupun tanpa disadari oleh individu, di mana mereka menginternalisasi norma-norma sosial yang ada di lingkungan mereka dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan harapan masyarakat (Lahamit, 2021).

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai sosialisasi, yaitu:

- a. Sosialisasi merupakan proses yang dinamis dan berlangsung sepanjang siklus hidup individu.
- b. Sosialisasi membentuk konstruksi sosial individu, termasuk cara pandang terhadap realitas sosial.
- c. Melalui sosialisasi, individu internalisasi norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat.
- d. Hasil akhir dari proses sosialisasi dapat membentuk identitas sosial individu, baik dalam konteks positif maupun negatif, yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.

2.2.2 Bentuk Sosialisasi

Berger dan Luckman mengemukakan bahwa sosialisasi terjadi dalam dua fase, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder (J. Syarif, 2014)

- a. Sosialisasi primer adalah tahap awal yang dialami individu di masa kanak-kanak, di mana mereka mulai menjadi anggota masyarakat. Pada fase ini, sosialisasi primer berperan dalam membentuk kepribadian anak dan memperkenalkan mereka kepada dunia yang lebih luas, dengan keluarga sebagai agen sosialisasi utama.

- b. sosialisasi sekunder, yang didefinisikan sebagai proses di mana individu yang telah menjalani sosialisasi primer diperkenalkan ke dalam sektor-sektor baru dari masyarakat. Di sini, sosialisasi bertujuan untuk mengembangkan sikap profesionalisme dan keterampilan khusus, dengan lembaga pendidikan, kelompok sebaya, tempat kerja, dan lingkungan sosial lainnya sebagai agen sosialisasinya.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Waters dan Crook, yang menyatakan bahwa sosialisasi berlangsung dalam tiga fase: sosialisasi primer, sekunder, dan tersier. Sosialisasi primer terjadi dalam keluarga, sementara sosialisasi sekunder berlangsung di luar keluarga. Sosialisasi tersier muncul ketika individu memasuki situasi sosial baru di masa dewasa. Meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian fase-fase sosialisasi ini, baik Waters dan Crook maupun Berger dan Luckman sepakat bahwa sosialisasi primer adalah fase yang paling krusial untuk mempersiapkan individu sebelum mereka terjun ke kehidupan masyarakat yang sesungguhnya (J. Syarif, 2014).

2.2.3 Sosialisasi Politik

Rush dan Althof berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah proses yang memperkenalkan sistem politik kepada individu dan bagaimana individu tersebut merespons serta bereaksi terhadap fenomena politik yang ada. Maran juga menyatakan bahwa sosialisasi politik memungkinkan individu untuk mengenali sistem politik, yang pada gilirannya memengaruhi persepsi dan reaksi mereka terhadap gejala-gejala. Berdasarkan berbagai pendapat dan konsep yang telah diungkapkan oleh para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana individu memahami cara kerja sistem politik, mendalami isu-isu politik, serta memahami nilai-nilai yang terkandung dalam aspek-aspek politik tersebut (M. A. Syarif, 2016).

Gabriel A. Almond menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang secara khusus berfungsi untuk membentuk nilai-nilai politik, serta menunjukkan bagaimana setiap

anggota masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam sistem politik yang ada. Sejak masa kanak-kanak, anak-anak mulai belajar memahami sikap dan harapan politik yang berlaku dalam lingkungan mereka.

Sosialisasi politik dapat berupa transmisi dan pengajaran yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai, dan emosi terkait politik secara eksplisit. Contohnya adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan sejarah di sekolah lanjutan, yang merupakan contoh nyata dari sosialisasi politik langsung. Sementara itu, sosialisasi politik tidak langsung terutama dominan dalam masa kanak-kanak, di mana individu mulai mengembangkan sikap penurut atau pembangkang terhadap orang tua, guru, dan teman. Sikap-sikap ini cenderung mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka di masa dewasa, termasuk reaksi mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik dan sesama warga negara (Pratiwi dkk, 2015).

Partisipasi politik adalah aktivitas yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kegiatan ini dilakukan oleh individu dalam kapasitas mereka sebagai warga negara, bukan sebagai politisi atau pegawai negeri. Karakteristik dari partisipasi politik ini adalah sukarela, tanpa adanya paksaan dari negara atau partai yang berkuasa. Efriza menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan elemen dari proses sosial. Sosialisasi itu sendiri adalah aktivitas pengajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain secara alami. Dalam proses ini, pengajaran dan pendidikan tersebut terkait dengan nilai-nilai politik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai politik yang dimiliki setiap individu dapat bervariasi. Selanjutnya, dijelaskan bahwa individu-individu mengalami proses ini dalam tingkat yang berbeda-beda, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam sistem politik, seperti partisipasi politik (Rahman, 2017).

Terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya sosialisasi dalam politik menurut Gatara dan Dzulkiah (Nababan dkk., 2020).

1. Sosialisasi adalah proses pembelajaran yang dihasilkan dari pengalaman individu dalam mengamati fenomena di sekitarnya.
2. Sosialisasi memberikan gambaran umum tentang hasil pembelajaran perilaku individu dalam konteks yang luas, mencakup pengetahuan, motif, nilai, dan sikap yang dialami oleh seseorang, kelompok, atau masyarakat.
3. Sosialisasi berlangsung di semua tahap kehidupan, dari masa kanak-kanak hingga usia tua. Dengan kata lain, sosialisasi tidak mengenal batasan usia.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan proses yang kompleks dan esensial bagi keberlangsungan demokrasi. Sosialisasi politik berperan penting dalam memperkenalkan individu kepada sistem politik dan membentuk nilai-nilai serta sikap mereka terhadap fenomena politik. Melalui sosialisasi, individu belajar untuk memahami cara kerja sistem politik, mendalami isu-isu yang ada, dan mengembangkan reaksi serta persepsi yang akan memengaruhi partisipasi mereka di masa depan.

2.2.4 Hubungan Sosialisasi Politik Dengan Partisipasi Politik

Michael Rush dan Philip Althoff menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan hasil dari proses sosialisasi politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa partisipasi politik juga berpengaruh terhadap sosialisasi itu sendiri; tanpa adanya partisipasi politik yang aktif, proses sosialisasi politik akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya (Wahyudi dkk, 2019).

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara sosialisasi politik dan partisipasi politik. Sosialisasi politik mengandung elemen informasi yang sangat penting, di mana informasi ini akan menjadi panduan bagi pemilih pemula untuk terlibat dalam berbagai kegiatan

pemilihan kepala daerah, baik itu dalam memberikan suara maupun mengikuti kampanye calon yang mereka dukung. Selain itu, sosialisasi politik juga mencakup aspek yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon yang mereka pilih. Kepercayaan ini, pada gilirannya, akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan kata lain, semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap calon tertentu, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan tersebut.

2.2.5 Metode Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula

Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, terdapat beberapa metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan. Metode tersebut meliputi:

Sosialisasi pendidikan pemilih secara langsung:

- a) forum warga
- b) diskusi
- c) seminar
- d) lokakarya (*workshop*);
- e) pelatihan
- f) ceramah
- g) simulasi
- h) gelar wicara (*talkshow*)
- i) pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
- j) metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilihan dengan baik misalnya berupa pembentukan relawan demokrasi atau penunjukan duta pemilihan dan metode lainnya.

Secara pendidikan pilih secara tidak langsung:

- a) media massa cetak, berupa surat kabar, tabloid, buletin, dan/atau media massa cetak lainnya
- b) media massa elektronik berupa televisi dan radio
- c) media massa daring/*online* berupa media massa berbasis internet yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada undang-undang mengenai pers dan kode etik jurnalistik
- d) media daring berupa laman, aplikasi pertemuan tatap muka virtual, surat elektronik, dan/atau layanan pesan singkat
- e) media sosial berupa blog/*vlog*, jejaring sosial, blog mikro, berbagi media, dan/atau forum *online*
- f) media luar ruang berupa spanduk, pataka atau banner, baliho, reklame cetak, reklame elektronik, umbul-umbul, dan/atau media luar ruang
- g) penyebaran bahan atau barang sosialisasi meliputi brosur, selebaran, pamflet, poster, pakaian, dan/atau bahan atau barang
- h) media kreatif berupa seni musik, seni tari, seni rupa, seni peran, seni fotografi, sinematografi, seni digital, dan
- i) media lainnya yang dapat digunakan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara luas.

Agen sosialisasi politik dapat dibedakan menjadi enam kategori utama, yaitu keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, situs jejaring sosial, dan kontak politik langsung. Dalam konteks pemilih pemula yang berada dalam rentang usia 17 hingga 21 tahun, individu-individu ini sering kali berstatus sebagai mahasiswa atau pekerja muda. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa agen sosialisasi juga mencakup lingkungan kampus bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi, serta tempat kerja bagi mereka yang sudah memulai karir. Dengan demikian, baik lingkungan akademis maupun profesional memainkan peran signifikan dalam membentuk pandangan politik dan partisipasi pemilih pemula dalam proses demokrasi (Rahman, 2017).

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa cara untuk menarik pemilih pemula hal yang dapat dilakukan KPU Provinsi Lampung adalah:

- a) melakukan sosialisasi secara langsung melalui ceramah, dialog, dan diskusi di sekolah-sekolah, kampus, atau komunitas. Metode ini memungkinkan interaksi langsung antara penyelenggara pemilu dan pemilih pemula, sehingga mereka dapat bertanya dan mendapatkan penjelasan yang jelas.
- b) mengadakan simulasi pemilihan, untuk memberikan pengalaman nyata tentang proses pemungutan suara.
- c) mengintegrasikan materi sosialisasi dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan dasar tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih.
- d) menyediakan brosur, poster, dan materi cetak lainnya yang berisi informasi penting mengenai tahapan pemilu, cara memilih, serta dampak dari golput.
- e) mengadakan *event-event* menarik seperti kuis, konser atau permainan yang berkaitan dengan pemilu, sehingga dapat menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi aktif dari pemilih pemula.

Melakukan sosialisasi bagi pemilih pemula secara tidak langsung dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang memanfaatkan teknologi dan media. Berikut adalah beberapa metode yang efektif

- a) pemanfaatan media masa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi edukatif mengenai pemilu melalui platform seperti *Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook*. Konten yang disajikan bisa berupa video, pamflet digital, poster digital yang berkaitan dengan pemilu dan tutorial yang menjelaskan cara memilih, infografis yang menggambarkan proses pemungutan suara, serta diskusi interaktif yang melibatkan tokoh politik atau ahli di bidangnya.
- b) Bekerjasama dengan lembaga penyiaran (stasiun tv dan radio lokal) dan instansi/lembaga lainnya dengan memanfaatkan platform digital

terkait penyelenggaraan program mengenai pemilu, dengan adanya kemudahan aksesibilitas dan kemampuan berinteraksi secara daring diharapkan pemilih pemula dapat tertarik.

2.3 Pemilih Pemula

Pengertian pemilih pemula (*first-time voters*) merujuk pada warga negara yang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, telah memenuhi syarat untuk memberikan suara dan untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih mereka dalam suatu pemilihan umum, baik itu pemilu nasional maupun pilkada. Kelompok pemilih pemula ini sangat beragam, mencakup pelajar dan mahasiswa yang berada dalam rentang usia 17 hingga 22 tahun, dihitung berdasarkan pelaksanaan pemilu setiap lima tahun. Selain itu, kelompok ini juga termasuk individu yang sudah atau pernah menikah meskipun usianya belum mencapai 17 tahun, serta pensiunan anggota TNI/Polri. Dengan demikian, pemilih pemula mencakup berbagai latar belakang dan status sosial, yang semuanya memiliki potensi untuk berkontribusi dalam proses demokrasi melalui partisipasi mereka dalam pemilu (Islah dkk, 2020).

Pemilih pemula adalah mereka yang baru saja mencapai usia minimal untuk ikut serta dalam pemilihan umum, yakni mereka yang berusia 17 tahun atau telah menikah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini membuat banyak pemilih pemula yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pemilihan dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Akibatnya, mereka rentan terhadap manipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dengan liciknya menggunakan segala cara untuk merebut simpati dan suara para pemilih pemula. Dengan demikian, pentinglah untuk melakukan sosialisasi politik yang intensif guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai proses demokratisasi dan perlindungan hak-hak sipil mereka (Irayanti dkk., 2022).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, khususnya dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20, pemilih pemula didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara telah

mencapai usia 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah menikah, dan memiliki hak pilih. Dengan demikian, kriteria untuk menjadi pemilih pemula mencakup individu yang berusia minimal 17 tahun, telah menikah, atau yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya saat pemilihan umum berlangsung.

Salah satu peran penting dari masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam konteks politik, adalah fungsi kontrol yang mereka miliki terhadap jalannya pemerintahan. Melalui fungsi ini, pemilih pemula dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu saja. Dengan demikian, keterlibatan aktif dari pemilih pemula dalam proses politik tidak hanya memberikan suara mereka tetapi juga memastikan bahwa suara tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat luas (Rahman, 2018).

Pemilih pemula adalah individu yang baru mulai terlibat dalam proses pemilihan dan belum memiliki ikatan emosional yang kuat, baik dari segi ideologi, nilai-nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, maupun aspek psikografis dengan kandidat yang bersaing dalam pemilihan. Saat ini, pemilih pemula menunjukkan kemampuan analitis yang tinggi dalam menilai kelebihan dan kekurangan seorang kandidat (La Suhu dkk, 2019).

Pemilih pemula memiliki peran signifikan dalam pemilihan umum, karena suara mereka berkontribusi besar terhadap total suara yang ada. Mereka sering kali memiliki orientasi politik yang tidak stabil, sehingga rentan terhadap pengaruh eksternal. Oleh karena itu, penting bagi pemilih pemula untuk mengembangkan keterampilan partisipasi politik yang baik. Tanpa kemampuan tersebut, kualitas pemilih pemula akan menurun, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas pemilu secara keseluruhan. Untuk itu, sosialisasi politik menjadi sangat diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif (Rahman, 2017).

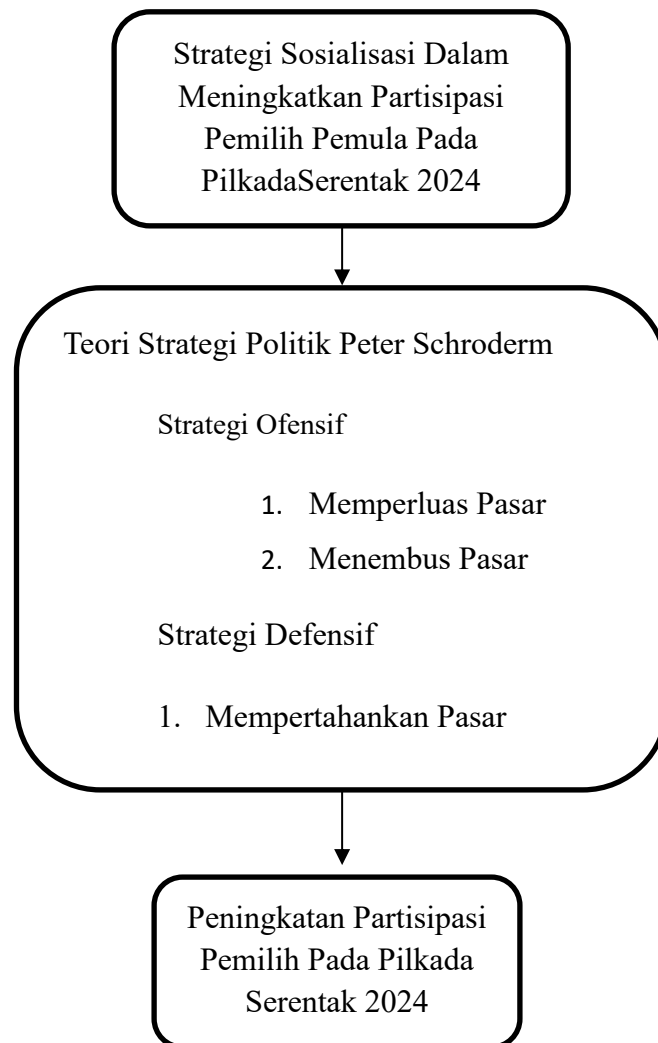
Keberhasilan pemilihan umum sangat bergantung pada beberapa faktor penting, salah satunya adalah keterlibatan dan antusiasme pemilih pemula. Pemilih pemula, yang merupakan individu yang baru pertama kali menggunakan hak

suara mereka, menghadapi tantangan bersama dalam hal bagaimana mengarahkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam arena politik. Usia mereka, yang berada dalam rentang remaja, sering kali membuat mereka berada dalam kondisi emosional yang labil saat mengambil keputusan, terutama ketika berhubungan dengan pilihan politik yang masih asing bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan kematangan dalam proses pengambilan keputusan pada usia-usia ini, termasuk dalam menentukan pilihan politik. Dalam tahap ini, pemilih pemula cenderung memiliki pandangan yang masih sederhana dan naif mengenai isu-isu politik, sehingga penting untuk memberikan edukasi dan dukungan yang memadai agar mereka dapat memahami dan terlibat secara aktif dalam proses demokrasi (Beniman dkk., 2022).

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu pemahaman yang menjadi dasar bagi pemahaman lainnya, berfungsi sebagai fondasi utama untuk setiap pemikiran atau proses dalam keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan kerangka berpikir ini untuk mengarahkan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai, serta berfungsi sebagai peta konsep dalam proses penelitian.

Dari permasalahan terkait rendahnya partisipasi pemilih pemula, yang diduga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pemilu dan perilaku ikut-ikutan yang dipengaruhi oleh faktor keluarga atau lingkungan, maka sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterbukaan pemikiran para pemilih pemula terhadap pilihan mereka. Penulis memilih teori yang digunakan pada penelitian ini ialah strategi politik Peter Schroder yang meliputi strategi politik mencakup dua pendekatan utama: strategi ofensif yaitu perluasan pasar dan menembus pasar, yang bertujuan untuk menarik perhatian pemilih baru, dan strategi menahan pasar, yang berfokus pada mempertahankan pemilih lama dengan cara yang lebih efektif. Visualitas kerangka berfikir tentang penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian Strategi Sosialisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur Lampung 2024 ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, sering pula disebut sebagai penelitian natural atau penelitian alamiah, merupakan jenis penelitian yang lebih fokus pada pemahaman proses dan makna daripada hasil yang dapat diukur secara eksak dengan menggunakan data deskriptif

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki kondisi yang alami, berlawanan dengan pendekatan eksperimen, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yang merupakan kombinasi dari berbagai metode. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi. Sementara itu, Kirk dan Miller, sebagaimana dikutip oleh Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan terhadap manusia, baik dalam konteks maupun situasi tertentu (Safarudin dkk., 2023).

Alasan peneliti memilih tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah karena dalam menganalisis fenomena, diperlukan data pendukung yang diperoleh melalui teknik wawancara. Analisis yang didasarkan pada fakta di lapangan akan berkontribusi pada pengembangan teori. Metode kualitatif digunakan untuk menggali data yang mendalam, khususnya mengenai strategi sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada serentak 2024, dengan fokus pada KPU Provinsi Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan riset. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena dianggap strategis.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum 2024, dengan menggunakan teori Peter Schroder. Terdapat tiga indikator utama :

1. Perluasan pasar: Strategi sosialisasi KPU Provinsi Lampung yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pemilih baru, sehingga mereka memahami pentingnya suara yang mereka berikan.
2. Menembus pasar: KPU Provinsi Lampung berupaya memperkuat hubungan antara dengan pemilih yang sudah ada, memastikan mereka tetap terlibat dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang.
3. Mempertahankan pasar: KPU Provinsi Lampung berupaya untuk memastikan bahwa basis pemilih yang telah ada tetap stabil dan tidak mengalami penurunan.

3.4 Sumber Data

Data merupakan elemen dasar dalam penelitian, karena kualitas dan ketepatannya berpengaruh pada validitas dan akurasi hasil yang diperoleh. Pengumpulan dan analisis data yang teliti sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang berarti. Tantangan dalam memilih dan mengumpulkan data yang relevan berkisar pada ketersediaan, kualitas, serta kesesuaian data dengan tujuan penelitian (Undari dkk, 2024).

Menurut Sugiyono sumber data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber utama adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengelompokan data berdasarkan cara perolehannya, seperti data primer dan sekunder, membantu peneliti dalam mengevaluasi keandalan dan relevansi informasi yang digunakan. Data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui wawancara, survei, atau eksperimen, umumnya dianggap lebih akurat dan relevan karena langsung berkaitan dengan konteks penelitian. Di sisi lain, data sekunder, yang diperoleh dari sumber yang telah ada seperti publikasi atau laporan, memungkinkan peneliti untuk menghemat waktu dan sumber daya, meskipun perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait keandalan dan kesesuaiannya (Abdussamad, 2021).

1. Data primer: , yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui wawancara, survei, atau eksperimen, umumnya dianggap lebih akurat dan relevan karena langsung berkaitan dengan konteks penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara pada Anggota dan Tim Sekretariat KPU Provinsi Lampung.
2. Data sekunder: yang diperoleh dari sumber yang telah ada seperti publikasi atau laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari publikasi, laporan, berita, dokumen ataupun sumber lain yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian yang digunakan peneliti adalah informan terpercaya yang mengetahui dan paham mengenai permasalahan KPU Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Sosialisasi Partisipasi Pemilih Pemula.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan yang relevan dan mendalam mengenai objek penelitian. Informan yang dipilih biasanya terlibat langsung dalam situasi sosial yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat untuk penelitian (Ngajudin dkk., 2019).

Alasan pemilihan *purposive sampling* didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Oleh karenanya informan yang dipilih ditunjukkan kepada pihak yang berkaitan langsung dalam proses sosialisasi.

NO	Nama	Jabatan
1.	Dedi Fernando., S.H.I., M.H.	Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Lampung Periode (2024-2029)
2	Moh. Ade Candra	Kasubbag Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Lampung
3	Bendi Juantara S.IP., M.A	Pengamat Politik
4	Ananta Farhan Zahran	Siswa SMAN 1 Bandar Lampung / Pemilih Pemula

5	Rindu Davina	Siswa SMAN 1 Bandar Lampung / Pemilih Pemula
6	Kian Ananta Pratama	Siswa SMAN 1 Bandar Lampung / Pemilih Pemula
7	M. Galih Ramadhan Hartono	Siswa SMAN 1 Bandar Lampung / Pemilih Pemula

Tabel 3. 1 Table Informan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dapat dilakukan, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara

Menurut Esteborg wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan tanggapan, sehingga komunikasi dan pembangunan bersama yang berarti tentang topik tertentu (Ngajudin dkk., 2019). Wawancara dapat diartikan sebagai proses interaksi antara dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai, dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang individu, organisasi, atau fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam setelah penentuan informan yang sesuai dengan kompetensi dan tugas mereka di KPU Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yang berarti proses wawancara mengikuti panduan berdasarkan pengembangan topik dan pertanyaan yang diajukan, sehingga lebih fleksibel dan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara terbuka.

2. Observasi

Menurut Margono, observasi sebagai teknik pengumpulan data melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang muncul pada objek penelitian (Suwartiningsih, 2021). Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melengkapi data serta mengamati fenomena dalam objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Jenis dokumen yang digunakan dapat mencakup catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh wawasan mengenai konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik pengolahan data yaitu:

1. Interpretasi Data

memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian, yaitu mengaitkan hasil analisis dengan konteks penelitian yang lebih luas, sehingga peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Proses ini melibatkan tidak hanya pemahaman terhadap data numerik dan fakta-fakta yang diperoleh, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan analisis menyeluruh terhadap informasi, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil. Dengan demikian, interpretasi data berfungsi untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan memberikan manfaat bagi pengembangan teori dan praktik di bidang terkait.

2. Editing Data

Editing data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena kualitas data yang baik memiliki dampak langsung pada hasil analisis dan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti. Proses ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa semua informasi yang digunakan akurat, konsisten, dan relevan. Dengan melakukan editing data, peneliti dapat memastikan bahwa mereka menggunakan informasi yang dapat diandalkan, sehingga kesimpulan yang diperoleh dari analisis tersebut tidak hanya valid tetapi juga memberikan

dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan pengembangan teori dalam bidang penelitian yang bersangkutan.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Sugiyono, adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengorganisasian data dalam kategori, menjabarkan informasi ke dalam unit-unit, melakukan penggabungan data, serta memilih informasi penting untuk dipelajari. Selain itu, analisis data juga melibatkan pembuatan kesimpulan yang memudahkan pemahaman bagi peneliti dan orang lain. Sementara itu, menurut Spradley, analisis data dalam penelitian merupakan suatu cara berpikir yang berkaitan erat dengan pengujian sistematis terhadap objek tertentu untuk menentukan bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan keterkaitannya dengan keseluruhan (Nur dkk, 2024). Peneliti mengacu pada beberapa tahapan teknik analisis data yaitu:

1. Reduksi data

reduksi data adalah proses merangkum dan memilih informasi yang penting serta memfokuskan pada hal-hal pokok yang sesuai dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pencarian tema dan pola, sehingga pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data selanjutnya. Dalam melakukan reduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, reduksi data juga mencerminkan proses berpikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan wawasan yang mendalam.

2. *Display Data*

Setelah mengumpulkan dan meringkas data, langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk yang sistematis. Penyajian data ini penting karena memungkinkan kita untuk melihat hubungan antara berbagai informasi yang telah dikumpulkan. Dengan menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik atau tabel, kita dapat lebih mudah memahami makna di balik data tersebut dan menarik kesimpulan yang relevan dengan penelitian kita.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah tahap penting yang bertujuan untuk merumuskan makna dari data yang telah dianalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini dimulai dengan menyusun kesimpulan sementara berdasarkan temuan awal, yang kemudian diverifikasi dengan membandingkan pernyataan responden dan bukti yang ada untuk memastikan validitasnya. Peneliti juga mencari pola, hubungan, dan perbedaan dalam data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Setelah melalui analisis dan verifikasi yang teliti, peneliti dapat menarik kesimpulan akhir yang relevan dengan tujuan penelitian, memberikan wawasan baru, dan menyajikan rekomendasi berdasarkan temuan tersebut. Dalam konteks ini, peneliti berusaha agar kesimpulan yang dicapai dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, yaitu mengenai strategi, dengan fokus pada studi di KPU Provinsi Lampung.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum KPU Provinsi Lampung

Gambaran Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Bab IV dalam penelitian ini akan membahas mengenai gambaran umum dari objek yang akan diteliti pada skripsi ini. Hal tersebut mencakup gambaran umum Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, visi misi, tugas dan wewenang serta jajaran komisioner KPU Provinsi Lampung periode 2024-2029.

4.1.1 Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Keadaan alam Lampung, di sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatra. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas)

Kabupaten/Kota , yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian pada tabel berikut

Tabel Wilayah kabupaten/kota dan kecamatan Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan		
		2019	2020	2021
1	Kabupaten Tanggamus	20	20	20
2	Kabupaten Lampung Barat	15	15	15
3	Kabupaten Lampung Selatan	17	17	17
4	Kabupaten Lampung Timur	24	24	24
5	Kabupaten Lampung Tengah	28	28	28
6	Kabupaten Lampung Utara	23	23	23
7	Kabupaten Way Kanan	14	14	14
8	Kabupaten Tulang Bawang	15	15	15
9	Kabupaten Pesawaran	11	11	11
10	Kabupaten Pringsewu	9	9	9
11	Kabupaten Mesuji	7	7	7
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	9	9	9
13	Kabupaten Pesisir Barat	11	11	11
14	Kota Bandar Lampung	20	20	20
15	Kota Metro	5	5	5

Sumber: Website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Table 4.1

4.1.2 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Sejak era reformasi bergulir, tuntutan untuk membentuk penyelenggaran Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa semakin menguat. Sehingga pada tahun 1999 dibentuk penyelenggara Pemilu yang bersifat Independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada awal dibentuk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari 48 wakil partai politik peserta Pemilu dan 5 orang wakil pemerintah.

Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) No mor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 37 harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah Anggota KPU Provinsi adalah 5 orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Namun sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, maka jumlah Anggota KPU Provinsi Lampung menjadi 7 orang. Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama.

KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU membentuk Badan Ad Hoc yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan (disebut dengan PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa (disebut PPS/ Panitia Pemungutan Suara), dan di tingkat TPS / Tempat Pemungutan Suara (disebut KPPS/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu, untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri, KPU juga dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Kpu berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, kpu provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

38 Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan berikutnya.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sedangkan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.3 Visi Misi Kpu Provinsi Lampung

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan visi, misi dan Tujuan KPU Provinsi Lampung Sebagai berikut:

1. Visi KPU Provinsi Lampung

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

2. Misi KPU Provinsi Lampung

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Melaksanakan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni: Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan KPU Provinsi Lampung

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung adalah: 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, profesional dan berintegritas; 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4.1.4 Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Lampung

1. Tugas KPU Provinsi Lampung

Adapun tugas KPU Provinsi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu:

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
- memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh menetapkan sebagai Daftar Pemilih;
- merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
- mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
- melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
- mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Wewenang KPU Provinsi

Selain itu, Kewenangan KPU Provinsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:

- menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
- berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu mengumumkannya; anggota DPRD Provinsi dan
- menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Kewajiban KPU Provinsi Lampung

Sedangkan kewajiban KPU Provinsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:

1. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

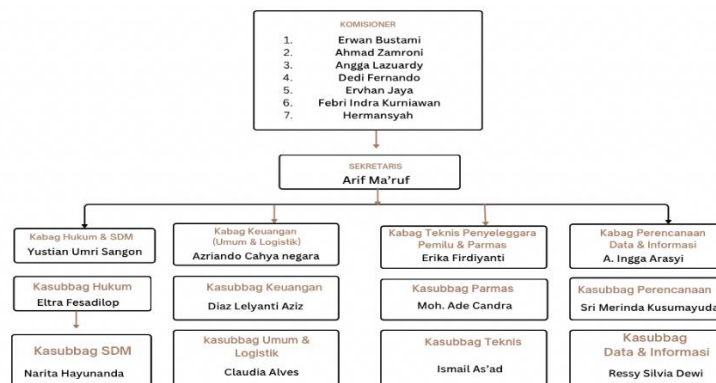
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga
7. Kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 8.
9. Menyampaikan laporan periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; 9.
10. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
11. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
12. Menyediakan dan menyampaikan Data Hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
13. Melakukan pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Melaksanakan putusan DKPP; dan
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat Provinsi Lampung yang mempunyai tugas dan wewenang, meliputi ;

4. Sekretariat KPU Provinsi Lampung bertugas:
 - Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; Memberikan dukungan teknis administratif;
 - Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;

- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
 - Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
5. Sekretariat KPU Provinsi Lampung berwenang:
- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan;
 - Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

4.1.4 Struktur Sekretariat KPU Provinsi Lampung



Gambar 4. 1 Bagan Sekretariat KPU Provinsi Lampung

4.2 Sejarah Pemilihan Gubernur Lampung

Pilkada Serentak 2024 di Indonesia menandai sebuah fase krusial dalam dinamika demokrasi lokal, yang pelaksanaannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, telah dirumuskan sebuah visi yang merepresentasikan aspirasi kolektif dan cita-cita luhur bangsa, yakni “Mewujudkan Pilkada Serentak yang Berintegritas, Berkualitas, dan Berkeadilan untuk Memperkuat Demokrasi Indonesia”. Visi ini mengandung tiga nilai fundamental yang menjadi fondasi utama pelaksanaan pilkada, yaitu integritas, kualitas, dan keadilan, yang secara sinergis diarahkan untuk memperkuat sistem demokrasi nasional.

Dengan diimplementasikannya visi dan misi yang saling terintegrasi serta dirancang secara menyeluruh, Pilkada Serentak 2024 diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi tinggi, tetapi juga memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pilkada yang berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ini diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi yang berlangsung, sehingga masyarakat semakin yakin bahwa proses pemilihan berjalan secara jujur dan adil. Lebih jauh lagi, keberhasilan dalam mengelola dan menyelenggarakan pilkada serentak secara efektif akan berkontribusi signifikan dalam menjaga dan memelihara stabilitas sosial serta politik di tingkat lokal, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Dengan demikian, tercapainya tujuan-tujuan tersebut melalui pilkada serentak akan menjadi pijakan penting dan bersejarah dalam

memperkokoh fondasi demokrasi di Indonesia, sekaligus membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung merupakan bagian penting dari proses demokrasi lokal yang terus berkembang sejak era Reformasi. Pilkada di Lampung pertama kali dilakukan secara langsung pada tahun 2005, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem ini menggantikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, memberikan masyarakat hak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung. Pilkada di Lampung mencatat sejarah penting pada tahun 2014 ketika pemilihan gubernur digelar bersamaan dengan Pemilu Legislatif, menjadikannya provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pemilu serentak. Dalam perkembangannya, Pilkada di Lampung juga menjadi bagian dari agenda nasional Pilkada serentak yang dimulai pada tahun 2015, dengan tujuan menyelaraskan masa jabatan kepala daerah di seluruh Indonesia. Pilkada Lampung sering kali diwarnai oleh dinamika politik yang kompetitif, melibatkan berbagai partai politik besar dan calon independen dalam kontestasi untuk memperebutkan posisi kepala daerah.

Pemilihan umum Gubernur Lampung 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, berbarengan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014. Awalnya, pemilihan ini direncanakan pada 27 Februari 2014, namun mengalami beberapa penundaan. Terdapat lima pasang kandidat yang bersaing dalam pemilihan ini: Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim yang maju melalui jalur independen; Berlian Tihang dan Mukhlis Basri yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Alzier Dianis Thabranie dan Lukman Hakim yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri yang didukung oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta beberapa partai non-parlemen; dan Herman HN bersama Zainudin Hasan yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) serta sejumlah partai kecil lainnya.

Dalam pemilihan ini, Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri berhasil meraih suara terbanyak dengan 1.816.533 suara atau sekitar 44,96%, sehingga mereka ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk periode 2014–2019.

4.3 Sosialisasi KPU Provinsi Lampung

Pada pemilu 2024, KPU Provinsi Lampung telah melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula baik secara langsung maupun secara media elektronik. Sosialisasi yang dilakukan kepada pemilih pemula pada kalangan mahasiswa yaitu “*Goes To Campus*” dalam kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, UKM, BEM, dan juga rektor. Sedangkan untuk pelajar KPU Provinsi Lampung melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa SMA/SMK selanjutnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dengan media sosial, yaitu dengan menggunakan media sosial Instagram dan tiktok dilihat dari hasil postingan media sosial KPU Provinsi Lampung. Sosialisasi terhadap kalangan mahasiswa dan pelajar yaitu agar tidak golput dan selalu menggunakan hak pilihnya secara benar. Karena semakin maraknya dunia sosial media yang digunakan oleh kalangan kaum milenial maka semakin luas informasi yang didapatkan untuk informasi yang baik ataupun informasi yang hoax, maka dari itu dilakukan sosialisasi bertujuan agar para pemilih pemula memilih sesuai dengan kemauan mereka tanpa adanya terpancing dari berita-berita hoax atau sekedar ikut-ikutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung hanya mencapai 65,39 persen, atau 4.267.976 dari 6.515.869 pemilih dalam DPT, mengalami penurunan signifikan dibandingkan Pemilihan Gubernur 2018 yang sebesar 70,99 persen. Artinya 2.224.524 pemilih di 13.282 TPS tidak menggunakan hak pilihnya, menunjukkan tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi. Dari hasil penelitian dan pembahasan strategi sosialisasi KPU Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur Lampung 2024, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait efektivitas strategi tersebut.

Berdasarkan temuan indikator strategi pemasaran KPU, terdapat tiga pendekatan utama yang berkaitan dengan hasil partisipasi ini

1. Strategi Memperluas Pasar

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menerapkan strategi perluasan pasar yang komprehensif dengan menasar segmen-segmen baru seperti pemilih pemula, organisasi kepemudaan, pelajar SMA, organisasi kampus, media, stakeholder, pemilih muda, dan pekerja sosial. Strategi ini diwujudkan melalui sosialisasi politik yang netral, sosialisasi konvensional dan digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait pemilihan untuk menjangkau kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terlibat dalam proses pemilu.

Meskipun KPU telah berupaya menjangkau segmen pemilih pemula dan kelompok yang belum tersentuh melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi kepemudaan, namun rendahnya partisipasi menunjukkan bahwa perluasan jangkauan ini belum optimal dalam menggerakkan pemilih baru untuk aktif menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara upaya sosialisasi yang telah dilakukan dengan efektivitas dalam mengubah perilaku politik masyarakat, sehingga KPU perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap metode dan pendekatan yang digunakan untuk merancang strategi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Lampung.

2. Strategi Menembus Pasar

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menerapkan pendekatan penetrasi pasar melalui pemetaan kebutuhan dan karakteristik pemilih pemula di berbagai daerah, dengan fokus pada segmen pemilih muda yang belum pernah memilih serta memahami lingkungan sosial mereka. Strategi ini diwujudkan melalui pemanfaatan media sosial, konten digital, dan metode sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik pemilih muda, baik melalui kegiatan tatap muka maupun media digital secara adaptif agar pesan kepemiluan dapat diterima sesuai kebutuhan dan konteks lingkungan masing-masing.

Meskipun pendekatan ini telah diterapkan, upaya menembus pasar masih menghadapi tantangan signifikan berupa apatisisme politik, ketidakpercayaan terhadap kandidat, keterbatasan akses informasi, serta pengaruh hoaks digital yang mengurangi efektivitas strategi dalam mendorong partisipasi. Kondisi ini menyebabkan strategi penetrasi pasar belum mampu secara signifikan meningkatkan partisipasi pemilih, bahkan partisipasi masyarakat dari pemilu ke pilkada cenderung menurun, sehingga memerlukan evaluasi mendalam dan inovasi strategi yang lebih responsif terhadap tantangan kontemporer dalam komunikasi politik digital.

3. Strategi Mempertahankan Pasar

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menerapkan strategi mempertahankan pasar dengan menjaga basis pemilih lama melalui sosialisasi berkelanjutan, kegiatan sosialisasi langsung, pembaruan data pemilih dan informasi secara berkala, serta pelibatan badan adhoc dan alumni program sosialisasi sebagai duta pemilu. Strategi ini menyasar seluruh elemen masyarakat yang memiliki hak suara untuk mempertahankan pemilih yang sudah terjangkau agar tidak golput dan menjaga kontinuitas partisipasi dalam proses demokrasi.

Meskipun upaya mempertahankan partisipasi telah dilakukan secara komprehensif, data menunjukkan bahwa masih ada banyak pemilih yang tidak hadir dan strategi ini belum cukup efektif untuk menahan laju penurunan partisipasi. Kondisi ini terjadi terutama di tengah rendahnya kepercayaan terhadap proses politik dan kecenderungan pemilih muda untuk mengikuti pilihan kelompok sebayanya atau orang tua, sehingga strategi mempertahankan pasar perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih intensif dan inovatif untuk mengatasi tantangan struktural yang mempengaruhi perilaku pemilih di Provinsi Lampung.

Secara keseluruhan, ketiga strategi yang telah diterapkan oleh KPU Provinsi Lampung yaitu strategi memperluas pasar, menembus pasar, dan mempertahankan pasar memang telah berjalan dengan baik dan mencakup berbagai upaya sosialisasi yang komprehensif. Namun, implementasi strategi tersebut belum mampu secara signifikan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Hal ini terlihat dari angka partisipasi yang masih relatif rendah dan adanya sejumlah tantangan seperti apatisme politik, ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, serta pengaruh hoaks dan disinformasi yang masih kuat di kalangan pemilih, terutama pemilih muda. Oleh karena itu, sangat diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap metode dan pendekatan yang selama ini digunakan agar dapat mengidentifikasi kelemahan serta peluang perbaikan. Selain itu, inovasi strategi yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer harus dikembangkan. Pendekatan yang lebih intensif dan personal, termasuk s teknologi digital secara maksimal dan kolaborasi lebih erat dengan berbagai elemen masyarakat, juga perlu diperkuat. Dengan demikian, diharapkan kualitas demokrasi

di Provinsi Lampung dapat semakin meningkat melalui partisipasi pemilih yang lebih luas dan aktif pada Pilkada mendatang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi KPU Provinsi Lampung dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula di masa mendatang:

KPU Provinsi Lampung perlu mengevaluasi metode sosialisasi dengan riset mendalam tentang perilaku dan preferensi pemilih, khususnya pemula, serta merumuskan strategi berbasis data dan *feedback* langsung. Sosialisasi yang lebih personal melalui peer-to-peer education dan pembentukan komunitas pemilih muda harus dikembangkan untuk memperluas penyebaran informasi.

Optimalisasi platform digital dan media sosial penting dilakukan dengan konten yang menarik dan interaktif, melibatkan influencer lokal, serta mengintegrasikan edukasi literasi digital dan anti-hoaks. Pusat informasi digital 24/7 juga perlu disediakan untuk klarifikasi informasi terkait pemilu.

Kolaborasi multi-stakeholder harus diperkuat dengan melibatkan berbagai institusi dan tokoh masyarakat, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk program partisipasi pemilih. Pendidikan politik juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah secara praktis dan kontekstual.

Penelitian selanjutnya disarankan fokus pada faktor psikologis, sosiologis, dan ekonomi pemilih, studi komparatif daerah dengan partisipasi tinggi, serta efektivitas media sosial dalam mempengaruhi perilaku pemilih muda. Masyarakat, terutama generasi muda, diharapkan meningkatkan kesadaran politik, aktif dalam edukasi, dan lebih kritis dalam menerima informasi dengan memverifikasi sumber terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.
- Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Atmaja, S., & Perwithasari, R. (2019). *ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SWOT PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG*.
- Beniman, Ikbar, Mursin, & Parisu, C. Z. L. (2022). PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU 2024 Beniman SMA Negeri 1 Napabalano Mursin Chairan Zibar L Parisu. In *JSES: Jurnal Sultra Elementary School* (Vol. 3, Issue 2).
- Fitri, A. N., Rohmah, S., & Ayu, A. S. (2024). Strategi Komunikasi KPU Kota Semarang Dalam Mengajak Gen Z Menggunakan Hak Pilih #temanpemilih. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 61–72. <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i1.22256>
- Harianja, G. P. D., Yudarta, I. P. D., & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. In *Communication and Policy Review* (Vol. 1, Issue 3). <https://ijespgjournal.org/index.php/shkr88>
- Haryono, D. (2018). *STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2015*.
- Hasfhi Mutorizal Sah Fenta. (2024). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Sosialisasi Pemilu Kepada Generasi Milenial Dan Gen Z Di Jakarta Selatan*.
- Herdiana. (2018). *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar Abstrak*.
- Irayanti, I., Ipandang, I., Ahmadi, A., Ibrahim, M. M., & Wahid, A. (2022). Sosialisasi Pendidikan Demokrasi pada Pemilih Pemula. *Dedication : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161–166. <https://doi.org/10.31537/dedication.v6i2.814>

- Islah, K., & Sulaeman Nasim, E. (2020). Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok. In *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1). <http://ojs.stiami.ac.id>
- La Suhu, B., & Wance, M. (2019). *Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada* (Vol. 91).
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 32–45. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766)
- Mangngasing, N., Haryono, D., & Indriani, N. (2023). *Journal SOCIALIZATION OF INCREASING BEGINNER VOTER ENGAGEMENT IN 2024 ELECTIONS IN SARJO D* (Vol. 2, Issue 2). <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIKEMAS>
- Munthe, G. E., Lubis, M. A., & Harahap, M. (2024). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Strategi Milenial Terhadap Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Millennial Strategy Against Whites (Golput) in the 2024 Regional Head Elections*. 6(1), 166–174. <https://doi.org/10.31289/arbiterv6i1.4091>
- Nababan, R., Pinem, U. J., & Purba, A. (2020). *HUBUNGAN SOSIALISASI POLITIK DENGAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN DAIRI KECAMATAN GUNUNG SITEMBER Oleh: Rosma Nababan I).* <https://kpu.id/dpt/kec.gunungsitember/pilkada/2018>
- Napir, S. (2016). *STRATEGI PEMENANGAN FAHMI MASSIARA-LUKMAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015 DI KABUPATEN MAJENE* (Vol. 2, Issue 2).
- Ngajudin, N., Effendi Chua, Arwin, Han, W. P., & Williny. (2019). *ANALISIS MOTIVASI KERJA KARYAWAN BAGIAN PEMASARAN PT. GLOBAL MITRA PRIMA*.
- Nur, E., Besar, B., Sumber, P., Manusia, D., Komunikasi, P., Makassar, I., & Abdurrahman Basalamah, J. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI TIM SUKSES PADA KAMPANYE POLITIK UNTUK MEMENANGKAN CALON LEGISLATIF KOTA MAKASSAR The Communication Strategy of Success Team in Political Campaign to Win Legislative Candidates in Makassar. In *Jurnal Diakom* | (Vol. 2, Issue 1).
- Nur, M. A., & Saihu, M. (2024). PENGOLAHAN DATA. In *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi* (Vol. 2, Issue 11).
- Pratiwi, P., & Wiwik Widayati. (2015). *SCHOOL'S ROLE ON STUDENTS POLITICAL SOCIALIZATION IN SMA NEGERI 1 PURWODADI*. www.fisipundip.ac.id
- Pulungan, M. C., Rahmatunisa, M., & Herdiansah, A. G. (2019). *STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019*.

- Purwanti, I. (2019). *STRATEGI KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGUATAN DESA WISATA*. 8(3), 101. www.publikasi.unitri.ac.id
- Rahma Bachtiar, F. (2014). *PEMILU INDONESIA: KIBLAT NEGARA DEMOKRASI DARI BERBAGAI REFRESENTASI 1*.
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic925740.files/Week%206/Mainwaring_Latin.pdf
- Rahman, A. (2017). *Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula*.
- Rahman, A. (2018). *Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>
- Safarudin, R., Zukfamana, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). 9680-9694.
- Suwartiningsih. (2021). Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Pokok Bahasan Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan di Kelas IXb Semester Genap SMPN 4 Monta Tahun Pelajaran 2020/2021. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 1(2), 80–94. <https://doi.org/10.53299/jppi.v1i2.39>
- Syarif, J. (2014). *SOSIALISASI NILAI-NILAI KULTURAL DALAM KELUARGA*.
- Syarif, M. A. (2016). *PENGARUH SOSIALISASI POLITIK DAN STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA 2015 DI KELURAHAN AIR PUTIH KOTA SAMARINDA*.
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat (5)
- Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.
- Undari, S., & Mospawi, M. (2024). *MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER*.
- Wahyudi, M. I., & Adnan, M. F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang 2018. *Jurnal Perspektif*, 2(3), 159. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.83>
- Zakiruddin, M. A., & Lestari, B. I. (2023). *ERA POST TRUTH DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BENGKULU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA*